

# PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA) SINAR HULAWA DESA HULAWA KECAMATAN PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO

Srie Isnawaty Pakaya \*<sup>1</sup>

Lisda L. Asi <sup>2</sup>

Novriliya Hintalo <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Gorontalo

\*e-mail : [Novriliya\\_s1manajemen@mahasiswa.ung.ac.id](mailto:Novriliya_s1manajemen@mahasiswa.ung.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Sinar Hulawa Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan populasi seluruh karyawan BUMDes Sinar Hulawa yakni sebanyak 5 karyawan dan masyarakat setiap dusun sebanyak 35 orang. Teknik pengambilan sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang relatif kecil. Sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 40 orang. Alat uji analisis yang digunakan dalam menguji penelitian ini yaitu regresi linier sederhana. Metode analisis data menggunakan aplikasi SPSS 26. Berdasarkan analisis data, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap variabel pada penelitian ini bersifat valid dan reliabel. Pada uji asumsi klasik data berdistribusi normal. Hasil secara uji t Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan nilai determinasi (R Square) sebesar 0,507 atau 50,7%. Dimana pengaruh dikatakan sedang karena berada pada interpretasi kekuatan (0,30% - 0,60%), sedangkan sisanya 49,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Seperti, kualitas laporan keuangan, dan kompetensi sumber daya manusia.

**Kata Kunci :** Pengelolaan Keuangan, akuntabilitas Keuangan

## Abstract

This study aims to determine the extent to which financial management influences the financial accountability of Bumdes (Village-Owned Enterprises) Sinar Hulawa in Hulawa Village, Paguyaman Sub-district. Data collection techniques involved using questionnaires, with the population consisting of all employees of Bumdes Sinar Hulawa (5 employees) and residents from each hamlet (35 individuals). The sampling technique utilized was total sampling due to the relatively small population size, resulting in a total sample of 40 respondents. The analytical tools employed was simple linear regression, with data analysis conducted using SPSS version 26. Based on the data analysis, the findings indicate that all variables in the study a valid and reliable. The classical assumption tests show that the data are normalyl distributed. Menawhile the t-test result reveal that financial management significantly influences financial accountability, with a determination value (R Square) of 0.507 Or 50.7%. This influence is classitied as moderate considering its strength interpretation (0.30%-0.60%). On the other hand, the remaining 49.3% is addressed by other variables not examined in this study, such as the quality of financial statements and the competency of human resources.

**Keywords :** Financial Management, Financial Accountability

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan. Bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan, pembangunan dimulai dari wilayah-wilayah pelosok. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa Kepala Desa sebagai pemerintah desa memiliki kewenangan yang berkaitan dengan keuangan desa, yaitu untuk mengelola keuangan dan aset Desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, serta mengembangkan sumber pendapatan desa. Salah satu upaya pemerintah desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dengan menghadirkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Badan Usaha milik desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang digagas oleh pemerintah, dimana BUMDes ini diharapkan menjadi stimulus untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Desa dapat mendirikan BUMDes dengan mempertimbangkan beberapa faktor yakni : 1) inisiatif pemerintah Desa dan atau masyarakat Desa; 2) potensi usaha ekonomi Desa; 3) sumber daya alam di Desa; 4) sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; 5) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes (Permendes No. 4 Tahun 2015).

Adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pemerintah Desa memiliki hak pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara mandiri, sehingga pemerintah desa bisa menentukan program yang sesuai dengan potensi desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah desa dan masyarakat desa karena dapat memberikan banyak manfaat diantaranya : sebagai penyokong perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan.

Pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan harus didasari adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Dalam mendukung hal tersebut, maka BUMDes juga membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan. Suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pembuatan laporan keuangan yang tepat merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah akibat aktivitas pengelolaan sumber daya publik (S.C. Darwanis, 2013).

Menurut Mardiasmo (2002) ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan. Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif.

Mardiasmo (2018) memberikan pengertian terhadap akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah yang digunakan sebagai tanggung jawab dalam menyediakan, melaporkan, dan pengungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari pihak pemberi amanah yang berwenang sebagai wujud permintaan pertanggungjawaban tersebut. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kegiatan dan tindakan pengurus suatu unit organisasi kepada pihak-pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban juga direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga diukur sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat. Wahyudi Kumorotomo (2015:3) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai

dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Singkatnya akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah. Adanya akuntabilitas dapat sebagai sarana bahwa suatu amanah sudah dikerjakan atau dilaksanakan dengan baik.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada seluruh pemangku kepentingan (Budiati et al., 2020; Endang, 2022). Akuntabilitas yang baik mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Nakmahachalasint & Narktabtee 2019; Tran et al., 2021). Akuntabilitas mampu menyajikan informasi keuangan relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan dapat diverifikasi (Cohen & Karatzimas, 2017). Namun, akuntabilitas belum terimplementasi dengan baik disebabkan adanya ketidaksesuaian antara laporan pelaksanaan aktivitas dengan aktivitas sebenarnya, tidak adanya bukti pendukung, serta verifikasi laporan tidak dilakukan (Fitriana et al., 2018; Widiastuti et al., 2019). Selain itu, menurut (Wibowo & Hapsari, 2022) implementasi akuntabilitas belum dapat dioptimalkan karena pengelolaan keuangan BUMDes masih mengadopsi sistem pengelolaan keuangan pemerintah desa. Oleh sebab itu perlunya peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang memperoleh legitimasi dari negara untuk mewujudkan tata kelola yang baik (Khotami, 2017).

Menurut Romantis dan Kurrohman (2015), akuntabilitas semakin baik atau semakin tinggi pada pengelolaan keuangan desa maka semakin baik tingkat kepercayaan kepada masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik antara pemerintahan dengan masyarakat. Wiguna, et all (2015), agar terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukannya pengawasan dari pihak internal maupun pihak external. Dengan dilakukannya pengawasan maka pihak SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai fungsinya masing-masing. Faktor selanjutnya adalah partisipasi masyarakat, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan diharapkan masyarakat dapat mengungkapkan aspirasinya atau keinginannya terhadap pembangunan kepada pemerintah melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan, Subroto (2009).

Penelitian Maria Magdalena (2016) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jember berhasil membuktikan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang berarti bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan daerah, semakin mudah akses terhadap laporan keuangan daerah, serta semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Kemudian penelitian yang dilakukan Nurlaili di tahun 2016 pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di kota Bengkalis membuktikan bahwa Penyajian dan Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah. Demikian pula Hasil Penelitian Miftahul Reza Fauziyah dan Nur Handayani pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Pemerintahan Kota Surabaya pada tahun 2017, melalui uji analisis regresi linier berganda berhasil membuktikan bahwa Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas pelaporan keuangan Daerah.

Memperhatikan penjelasan di atas terlihat bahwa akuntabilitas bagian yang penting dalam tata kelola keuangan ataupun kinerja organisasi publik termasuk di desa. Karena itulah akuntabilitas dalam penelitian ini merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya dalam satu periode kepada masyarakat desa. Akuntabilitas ini sangat penting, mengingat pemerintah desa mengelola dana publik yang cukup besar sehingga masyarakat desa juga perlu mengetahui pengelolaannya dalam bentuk pertanggungjawaban tiap tahunnya. Akuntabilitas sangat penting untuk diterapkan karena merupakan salah satu pilar untuk kemajuan dan keberlangsungan hidup Badan Usaha Milik Desa, salah satunya BUMDes Sinar Hulawa Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Badan Usaha Milik Desa Sinar Hulawa Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman telah berdiri sejak tahun 2017 dan sampai saat ini kebijakan program BUMDes masih menjadi langkah yang diupayakan dalam menjawab masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Hulawa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa Hulawa nomor 3 tahun 2017 tentang

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam peraturan tersebut diuraikan bahwa tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama Sinar Hulawa itu salah satunya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa program yang dijalankan oleh pengelola BUMDes Sinar Hulawa yaitu sejak berdiri pada tahun 2017, BUMDes Sinar Hulawa memiliki 2 jenis usaha yang dijalankan yaitu usaha simpan pinjam dan usaha warung serba ada (Waserda). Dua jenis usaha ini menjadi awal perputaran ekonomi masyarakat Desa Hulawa. Usaha simpan pinjam sendiri memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Hulawa untuk memperoleh pinjaman uang dalam waktu yang cepat dengan bunga pengembalian sebesar 5%. Terdapat dua jangka waktu pinjaman yang diberikan yaitu per minggu (dalam jangka waktu 10 minggu) dan per bulan (dalam jangka waktu 10 bulan). Begitu pula dengan usaha warung serba ada (Waserda). Usaha tersebut dilakukan dengan menjual barang-barang harian yang dijual secara ecer maupun grosir. Kemudian pada tahun 2020 dan tahun 2021 BUMDes Desa Hulawa menambah 2 jenis usaha lainnya yaitu usaha peternakan sapi dan usaha jasa lapak dagang. Penambahan 2 jenis usaha ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Usaha peternakan sapi tersebut dilakukan dengan memberikan modal pembelian dan perawatan sapi yang kemudian akan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Dan untuk jasa lapak dagang sendiri memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin berdagang untuk menempati lapak dagang yang sudah disediakan. Sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan kegiatan jual beli dan di waktu yang bersamaan juga dapat membantu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat yang berdagang. Namun sangat disayangkan selama 3 tahun terakhir program-program BUMDes Sinar Hulawa tidak berjalan secara optimal. BUMDes yang didirikan sejak tahun 2017 tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang tidak begitu stabil. Hal ini dikarenakan terdapat 2 jenis usaha yang sudah tidak berjalan lagi yaitu usaha simpan pinjam dan usaha warung serba ada (Waserda). Akhirnya jumlah pendapatan BUMDes juga mengalami pertumbuhan yang tidak begitu stabil. Kondisi tersebut dilihat pada jumlah pendapatan BUMDes yang naik turun di setiap tahunnya. Di bawah ini terdapat tabel yang menyajikan data penyertaan modal dan pendapatan BUMDes Hulawa sejak tahun 2020 sampai tahun 2023.

**Tabel 1.1**  
**Penyertaan Modal dan Pendapatan BUMDes Sinar Hulawa**

No	Tahun	Penyertaan Modal	Target Pendapatan	Pendapatan
1	2020	Rp. 50.000.000	Rp. 70.000.000	Rp. 5.832.044
2	2021	Rp. 5.832.044	Rp. 5.000.000	Rp. 4.378.000
3	2022	Rp. 4.378.000	Rp. 5.000.000	Rp. 6.880.000
4	2023	Rp. 6.880.000	Rp. 10.000.000	Rp. 5.000.000

(Sumber data : BUMDes Sinar Hulawa 2023)

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penyertaan modal BUMDes dan pendapatan memiliki perbandingan yang cukup jauh. Seperti yang digambarkan pada tahun 2020 BUMDes Sinar Hulawa memperoleh penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000 dengan target pendapatan sebesar Rp. 70.000.000, namun dalam pelaksanaannya BUMDes hanya mampu memperoleh pendapatan sebesar Rp. 5.832.044. Kemudian pada tahun 2021 BUMDes menerima penyertaan modal sebesar Rp. 5.832.044, dengan target pendapatan sebesar Rp. 5.000.000 dan pendapatan yang menurun dengan jumlah Rp. 4.378.000. Kemudian tahun 2022 BUMDes memperoleh penurunan jumlah penyertaan modal sebesar Rp. 4.378.000 dengan target pendapatan sebesar Rp. 5.000.000, dengan pendapatan BUMDes yang menjadi Rp. 6.880.000. Dan pada tahun 2023 BUMDes memperoleh penyertaan modal sebesar Rp. 6.880.000 dengan target pendapatan sebesar Rp. 10.000.000 tetapi hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp. 5.000.000.

Menurut data yang disebutkan di atas, Kepala Desa Hulawa juga menyatakan bahwa terdapat beberapa masalah yang kemudian menyebabkan eksistensi dari BUMDes itu sendiri mulai redup. Disebutkan bahwa awal melambatnya perputaran ekonomi BUMDes ini terjadi pada saat pandemi Covid-19. Beberapa unit usaha yang memerlukan kegiatan secara tatap muka harus terhenti akibat aturan *work from home* (bekerja dari rumah) mulai diterapkan. Unit usaha warung serba ada (Waserda) menjadi unit usaha yang merasakan dampaknya. Karena masih kurangnya kemampuan pengelola BUMDes dalam melakukan manajemen keuangan pada saat covid dan pasca covid, akhirnya pengelola BUMDes hanya bisa pasrah melihat kondisi warung yang masih tersisa cukup banyak barang yang akan mendekati tanggal kadaluarsa (*expired*). Sehingga perputaran modal Waserda sudah tidak berjalan dengan semestinya.

Di sisi lain, BUMDes juga mengalami beberapa kendala dalam pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran laporan keuangan dengan format laporan keuangan manufaktur yaitu SDM (Sumber Daya Manusia) dalam keuangan, tingkat kompetensi, lingkup organisasi yang kecil dan komponen- komponen dalam format laporan keuangan manufaktur yang kompleks. Dan juga adanya pelaporan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). BUMDes Sinar Hulawa menyajikan hanya 3 jenis yaitu : neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ada lima jenis laporan yaitu : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Persoalan lainnya yang juga ikut menyebabkan BUMDes di Desa Hulawa belum dapat berjalan secara optimal adalah kondisi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola BUMDes. Pengelola BUMDes di Desa Hulawa hanya diisi oleh penasehat yang dijabat langsung oleh kepala desa, pengawas dari BPD, direktur, sekretaris dan bendahara. Dengan bermodalkan 5 orang pengelola, maka tidak heran jika dalam pelaksanaannya BUMDes masih mengalami kesulitan dalam menjalankan 4 unit usaha yang ada. Selain itu pembagian tugas dan fungsi juga kurang sesuai dengan kemampuan dan jenjang pendidikan yang mereka miliki. Kondisi tersebut akan memberikan pengaruh dalam proses akuntabilitas keuangan BUMDes ini.

## METODE

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Teori kuantitatif mendefinisikan hubungan antara variabel dan konstanta dalam satu set rumus matematika. Diberikan input numerik spesifik, teori kuantitatif menghasilkan output numerik spesifik. Hubungan yang dijelaskan kemudian dapat diuji dengan mengatur kondisi yang ditentukan dan mengamati apakah output mengambil nilai yang ditentukan dalam kesalahan pengukuran (Bordens & Abbott, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan BUMDES

Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan Keuangan memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan BUMDes Sinar Hulawa Di desa Hulawa Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.11 yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi dari pengaruh tersebut kurang dari 0,05 dan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  lebih besar daripada nilai  $t_{tabel}$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan BUMDes Sinar Hulawa Di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Setelah diteliti, terdapat adanya beberapa pengaruh pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan seperti :

1. Adanya pengumpulan data yang akuntabilitas dan transparan dalam menyediakan laporan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
2. Dalam penelitian ini aspek kejujuran serta keakuratan data dalam pencatatan laporan keuangan BUMDes Sinar Hulawa sudah berjalan dengan baik. Tetapi, dalam pencatatan laporan tersebut belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dimana memiliki 5 jenis laporan yaitu : Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan BUMDes Sinar Hulawa hanya menyajikan 3 jenis laporan saja yaitu : Neraca, laporan Laba Rugi, dan Arus Kas.
3. Terdapat penggolongan dan pengikhtisaran pada BUMDes Sinar Hulawa yang terkendali dengan bertujuan agar pengelompokkan transaksi keuangan lebih terstruktur, serta merangkum informasi menjadi laporan yang ringkas dan mudah dipahami.
4. Pelaporan adalah bagian penting dari pengelolaan keuangan yang memastikan bahwa informasi keuangan disusun, disajikan, dan dipertanggungjawabkan dengan transparansi, akurasi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Sehingga pada saat ini BUMDes Sinar Hulawa selalu menyajikan serta menyusun informasi keuangan sebagai pertanggungjawaban.

Penelitian ini serupa dengan studi yang dilakukan oleh Syalmi Saputri Simatupang (2022) di BUMDes Gabe Desa Sipan Sarudik Tapanuli Tengah, ditemukan bahwa pengelolaan keuangan mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan BUMDes yang menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik (anggaran, pencatatan, pelaporan) memiliki kinerja yang lebih baik.

Pengelolaan yang baik juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan desa melalui investasi yang tepat dan pengelolaan aset yang efisien. Selain itu, BUMDes yang transparan dalam pengelolaan keuangan juga cenderung mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat, yang berdampak positif pada partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap program-program desa.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Magdalena (2016) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jember yang berhasil membuktikan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Dan juga penelitian yang dilakukan Nurlaili di tahun 2016 pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di kota Bengkulu yang membuktikan bahwa Penyajian dan Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah

### Akuntabilitas Keuangan

Dengan demikian, setelah diteliti pengelolaan keuangan memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Sehingga akuntabilitas keuangan memiliki beberapa dampak, seperti :

1. Meningkatkan Transparansi
2. Peningkatan Pengawasan dan Kontrol
3. Efisiensi Penggunaan Dana
4. Kepatuhan Terhadap Regulasi dan Standar Akuntansi
5. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat
6. Mencegah Penyalahgunaan Anggaran

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmaida dan Handayani (2022), Fadil et al. (2022), Sukmawati dan Nurfitriani (2019), Putri dan Maryono (2022) yang menyebutkan bahwa adanya pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan. Halim dan Kusufi (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Ini dikarenakan akuntabilitas keuangan BUMDES merupakan kewajiban BUMDES dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BUMDES juga memiliki peran yang penting dalam perekonomian desa, karena berfungsi sebagai lembaga yang mengelola usaha ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas keuangan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat desa dan pihak terkait terhadap pengelolaan BUMDES.

BUMDES juga memiliki komponen-komponen utama, seperti : perencanaan keuangan yang jelas, pencatatan dan pembukuan yang transparan, laporan keuangan yang berkala, pengawasan dan evaluasi, serta pertanggungjawaban sosial.

Hal ini juga berhubungan dengan hasil uji valid pada 30 responden di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, dimana setiap variabel memiliki pengaruh antara pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan BUMDes. Artinya semakin baik pengelolaan keuangan, maka akan meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan yang baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan peneliti serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan BUMDes Sinar Hulawa Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.
2. Laporan keuangan yang disusun oleh BUMDes Sinar Hulawa terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas. Hal ini tentunya masih belum sesuai dengan SAK ETAP. Dalam SAK ETAP disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Pada akuntabilitas keuangan BUMDes menunjukkan pengawasan yang ketat dan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif menjadi faktor kunci dalam menjaga akuntabilitas keuangan. BUMDes yang memiliki mekanisme pengendalian internal yang baik dapat menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pencatatan keuangan, serta meminimalkan potensi kecurangan. Akuntabilitas keuangan BUMDes dapat terjaga dengan adanya prosedur pengawasan yang jelas.
4. Kualitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan keuangan BUMDes juga sangat berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas keuangan. SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan akan lebih mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan lebih tepat dalam mengambil keputusan terkait keuangan. Oleh karena itu, pelatihan dan

peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aditya paramarta, i. W., & ariyanto, d. (2021). Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan daerah dengan kualitas informasi sebagai variabel mediasi. *E-jurnal akuntansi*, 31(5), 1097. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i05.p03>
- Darussalam, r. F. (2021). *Analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (sak etap) pada laporan keuangan badan usaha milik desa (bumdes) harapan bundar di desa gunung bunder i kecamatan pamijahan kabupaten bogor tahun 2019*.
- Fakultas, j. A., unibba, e., setyanto, e., & ritchi, h. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintah daerah (survey atas kompetensi aparatur, kualitas software sia penerapan spi dan penerapan sap pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di provinsi jawa barat). In *jurnal ilmiah akuntansi* (vol. 9). [Http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat](http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat)
- Hehanussa, s. J. (2015). *Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota ambon salomi*. 2, 82–90.
- M titiokan, b., huliselan, m., sanduan, a., n ralahallo, f., & siahainenia, a. J. D. (2020). Pengelolaan keuangan bumdes di kabupaten kepulauan aru. *Jurnal pengabdian masyarakat jamak (manajemen & akuntansi)*, 03(01), 197–216.
- Mahmudah, s. (n.d.). *Akuntabilitas laporan keuangan badan usaha milik desa (studi kasus: bumdes desa sungon legowo bungah gresik)*.
- Pratiwi, s. (2022). *Keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa*.
- Puspitawati, l., & effendy, m. M. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan. *Jurnal agregasi: aksi reformasi government dalam demokrasi*, 9(1), 43–58. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i1.4372>
- Putri, h. T. (2022). Faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan pada mahasiswa fakultas ekonomi universitas batanghari. *Ekonomis: journal of economics and business*, 6(2), 688. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.680>
- Ratmasari, d. I., yuliani, n. L., & purwantini, a. H. (2021). Kualitas laporan keuangan bumdes dan faktor yang mempengaruhinya. *Borobudur accounting review*, 66–77. <https://doi.org/10.31603/bacr.4892>
- Ridzal, n. A. (2020). *Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) kabupaten buton*. <https://financial.ac.id/index.php/financial>
- Rika et al. (2023). Pengelolaan keuangan bumdes di era digital melalui manajemen sumber daya manusia. *Jemb-jurnal ekonomi ...*, 2(1), 18–35.
- Riping, b., tunggadewi, u. T., & ekonomi, f. (2022). *Peran sistem manajemen keuangan pada bumdes dalam peningkatan pendapatan asli desa serta kesejahteraan masyarakat di desa sumbersekar*.
- Salsabilla ayu wishmilia, f. S. A. (n.d.). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan bumdes di kecamatan pacet*.
- Soviatun, n., & rudianto, d. (2024). Pengaruh kebijakan manajemen keuangan terhadap nilai perusahaan. *Journal of economics and business abs*, 13(2), 503–515. <https://doi.org/10.52644/joeb.v13i2.1559>
- Syalmi saputri simatupang. (2022). *Pengaruh pengelolaan keuangan terhadap terciptanya akuntabilitas laporan keuangan bumdes gabe desa sipan sarudik, tapanuli tengah*. 1.
- Ummah, m. S. (2019). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kredit bermasalah (non performing laon) pada badan usaha milik desa (bumdes) di kecamatan kubutambahan, kabupaten buleleng. *Sustainability (switzerland)*, 11(1), 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/red2017-eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008>

- .06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\_sistem\_pembetungan\_terpusat\_strategi\_melestari
- Usman. (2023). *Pengaruh akuntabilitas dan pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan bumdes di kecamatan kabila bone provinsi gorontalo*. 2(2), 63–76. <https://doi.org/10.31289/jbi.v2i2.2934>
- Wilayah, k., yulia, s., fakultas ekonomi, d., mahaputra, u., & yamin, m. (2018). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal benefita*, 3(1). <https://doi.org/10.22216/jbe.v2i3.2376>